



Bupati Akan Gelar Syukuran

■ Pemkab Tiga Kali Raih WTP

KUBU RAYA, TRIBUN - Bupati Kubu Raya, Rusman Ali akan menggelar syukuran atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, di Gedung Zamrud Pontianak, Selasa (6/6)

Capaian WTP ini merupakan berturut-turut ketiga kalinya yang diraih Pemkab Kubu Raya.

"Nanti kita akan gelar syukuran sekaligus mengevaluasi peraih WTP ini. Semoga kita semakin giat lagi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar, serta sesuai aturan," kata Bupati

Menurut bupati dengan syukuran akan lebih mengingatkan bahwa keberhasilan WTP bukanlah kerja keras satu pihak saja, melainkan semua pihak di Pemkab Kubu Raya.

"Tak ada yang membuat berhasil WTP ini kecuali ker-



Tak ada yang membuat berhasil WTP ini kecuali kerjasama kita selaku bupati beserta wakil bupati hanya memimpin saja.

Rusman Ali
Bupati Kubu Raya

jasama kita semuanya. Saya selaku bupati beserta wakil bupati hanya memimpin saja. Tanpa adanya jajaran, tentunya saya tak akan bisa bekerja. Makanya dengan syukuran inilah, kita upayakan bisa mampu mewujudkan kembali WTP pada tahun berikutnya. Sehingga kita harus bekerja terus menerus dengan maksimal," terangnya.

Kabupaten Kubu Raya selama tiga tahun berturut turut menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Kubu Raya Rusman Ali yang menerima

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

- Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

langsung LKPD dari BPK perwakilan Kalbar. Bupati pun memastikan tak ada praktik jual beli atas raih WTP ini. Bahkan, kata dia, tak ada namanya negosiasi antara kepala daerah dan petugas auditor BPK, saat pemeriksaan keuangan daerah.

Kepala BPK Perwakilan Kalbar Ida Sundari mengatakan penentuan opini dilakukan secara berjenjang. Mulai dari melakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dibahas oleh tim review opini perwakilan yang sudah memperoleh sertifikat dari puskidat BPK.

"Semua dilakukan secara transparan. Dan ini melalui proses yang cukup panjang dan profesional, serta menjaga integritas selama proses pemeriksaan berlangsung ke setiap pemerintah daerah atau entitas," ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan aset di beberapa pemerintah daerah yang belum memadai masih terjadi, dan juga masih terdapat kesalahan dalam penganggaran.

"Walaupun nilainya masih di dalam batas nilai materialitas yang telah ditentukan," katanya.

Terkait, adanya isu permainan WTP, bupati tegas menampik jhal tersebut. Menurutnya hasil ini merupakan kerja keras dari semua jajaran serta pengawasan mendalam dari pihak pemerintah daerah guna mewujudkan realisasi laporan terbaik. (sid)

3. Tidak wajar (adversed opinion)

- Opini diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

4 Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion)

- Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit.

Jenis Opini

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

- Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
- Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

